Badung Tandatangani Kerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Denpasar

Gde Agung : ”Tingkatkan Sinergisitas Dalam Pelayanan”. Perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dan kompleks, terlebih di Kab. Badung sebagai daerah destinasi pariwisata dunia, dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan, hal mana dapat mengganggu kinerja Pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat dan upaya mewujudkan kedamaian, ketertiban dan kesejahtraan masyarkat. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah memandang perlu mendapat pertimbangan Hukum dari Kejaksaan, ungkap Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH saat menghadiri Acara Penandatanganan Naskah Kerjasama Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintahan Kab. Badung dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kab. Badung, I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung, Drs I Ketut Sudikerta, Sekretaris Daerah Kab. Badung, Kompyang R Swandika, SH, MH, Kapolresta Denpasar, Suryanbodo Asmoro, Asisten Perdata dan TU Kejari Bali, seluruh Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung serta Para Camat Se-Kab. Badung.
Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH menyampaikan apreasiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar beserta seluruh jajarannya, serta menyambut positif adanya kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar, karena kesepakatan sebagai sebuah komitmen bersama untuk mensukseskan pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarkat sesuai dengan salah satu Misi Kab. Badung yakni mewujudkan kepastian hukum, serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kerjasama itu sangat penting agar didalam mengambil kebijakan Pemerintah Daerah senantiasa berpedomana pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya perlu adanya hubungan kerjasama dan sinergisitas antara Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Eksekutif dan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Dalam kepastiannya Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Heru Sriyanto, SH,MH mengatakan Kejaksaan yang merupakan sebuah Lembaga Penegak Hukum yang bertugas dan berwenang di Bidang Penegakan Hukum memiliki peranan yang sangat strategis terkait dengan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah. Baik didalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu adanya hubungan kerjasama yan baik antara Pemerintah Daerah sebagai Lembaga Eksekutif dan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum. Kejaksaan sebagai Pengacara Negara juga dapat memberikan Bantuan Hukum dan tindakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan agar tetap berkoordinasi dan memanfaatkan sebaik-baiknya Surat Kuasa Khusus (SKK) ini, Kejaksaan Negeri Denpasar beserta seluruh jajarannya siap mendukung.